

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD**

Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah  
 Tahun Penilaian : 2021  
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021 -2026  
 Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Data : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi  
 Tujuan Strategis : Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan  
 Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan  
 Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak  
 Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3A/PKB  
 Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera  
 Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Sasaran Strategis : 1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan  
 2. Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif  
 3. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak  
 4. Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3A/PKB Provinsi Kalimantan Tengah  
 5. Meningkatkan kualitas keluarga  
 6. Meningkatnya akseptor KB  
 7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

IKU Renstra OPD	IKU	2023
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		81,92
2 Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)		3,5
3 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)		87,5
4 Indeks Perlindungan Anak (IPA)		63,68
5 Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)		55
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)		62,44
2 Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)		2,06
3 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)		73,68
4 Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%)		5,18
5 Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)		20

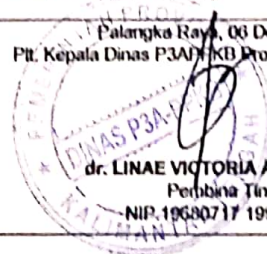
Informasi lain : Penilaian Resiko Strategi OPD Dilakukan Berdasarkan Atas Tujuan Strategis Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dan Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tujuan Strategis :  
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Sasaran Strategis :  
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

IKU Strategis :  
 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)  
 Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)  
 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)  
 Indeks Perlindungan Anak (IPA)  
 Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)  
 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)  
 Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)  
 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)  
 Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%)  
 Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)

Palangka Raya, 06 Desember 2021  
 Ptl. Kepala Dinas P3A/PKB Provinsi Kalimantan Tengah



dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M. Kes  
 Perbina Tingkat I  
 NIP. 19680717 199803 2 006

Formulir Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah  
 Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah  
 Tahun Penilaian : 2021  
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021 -2026  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah  
 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Uralan	Kode Risiko	Pemilik	Uralan	Sumber	Uralan		Pihak yang Terkena	
				e							f
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Rendahnya Peran Perempuan di Perekonomian daerah		Kepala Dinas	Minimnya Kapasitas Perempuan dalam dunia usaha	eksternal	C	1. Menurunnya Indeks Pemberdayaan Gender	1. Masyarakat 2. Perempuan	
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	Minimnya Penggunaan Anggaran yang Responsif Gender		Kepala Dinas	1. SDM Belum Memadai 2. Anggaran belum terkonsentrasi ke isu ARG	internal	C	1. Minimnya keadilan dan kesetaraan gender dalam penggunaan anggaran	1. Masyarakat 2. Perempuan	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan		Kepala Dinas	1. Ketidakhahaman atas jenis-jenis tindak kekerasan terhadap perempuan 2. Budaya masyarakat yang masih malu melaporkan masalah di	esternal	C	1. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terdeteksi 2. Layanan tidak terfasilitasi secara optimal	1. Masyarakat 2. Perempuan 3. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng	
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Belum optimalnya pencapaian Bobot 5 klaster pemenuhan Indikator IPA		Kepala Dinas	1. Perlindungan anak khususnya pada bidang kesehatan dan kesejahteraan dasar, perlindungan khusus, pendidikan masih membutuhkan perhatian yang	eksternal	C	1. Rendahnya Pemenuhan Hak Anak, Minimnya Perlindungan Anak, serta Rendahnya Tingkat Intelegensi Anak	1. Masyarakat 2. Anak 3. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng	
		Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap anak		Kepala Dinas	1. SDM Belum mumpuni 2. Anggaran belum terfokus ke koordinasi dan evaluasi indikator IPA dan kluster-kluster pendukungnya	internal	C	1. Terbatasnya pendataan bobot klaster IPA	1. Masyarakat 2. Anak	
		Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap anak		Kepala Dinas	1. Ketidakhahaman atas jenis-jenis tindak kekerasan terhadap anak 2. Budaya masyarakat yang masih malu melaporkan masalah di keluarga	eksternal	C	1. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terdeteksi 2. Layanan tidak terfasilitasi secara optimal	1. Masyarakat 2. Perempuan 3. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng	




No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Ketidkoptimalan dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga		Kepala Dinas	1. Kemiskinan dan Kebodohan di lingkungan keluarga	eksternal	C	1. Tidak optimalnya pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia	1. Masyarakat
		Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Peningkatan Jumlah Anak		Kepala Dinas	1. Masih minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pencegahan dan penanganan stunting	eksternal	C	1. Minimnya tingkat kecerdasan anak 2. Rendahnya sistem imun anak kini dan dikemudian hari rentan terhadap penyakit	1. Masyarakat 2. Anak
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mPCR)	Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah		Kepala Dinas	1. Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi	esternal	C	1. Meningkatnya jumlah anak tanpa rencana	1. Masyarakat 2. Perempuan
		Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%)	Trauma Penggunaan Alat KB		Kepala Dinas	1. Minimnya pemahaman dampak negatif dan positif penggunaan jenis-jenis alat KB	eksternal	C	1. Penggunaan alat kontrasepsi berkeluarga berencana yang masih rendah	1. Masyarakat 2. Perempuan
		Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	Kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), perdarahan persalinan		Kepala Dinas	1. Pengaruh Pesatnya perkembangan informasi dan publikasi hal-hal negatif seperti pornografi dan pornoaksi 2. Pergaulan bebas	eksternal	C	1. Terganggunya Kesehatan Fisik (Reproduksi) remaja, psikis maupun sosialnya	1. Keluarga 2. Anak 3. Remaja Perempuan dan Laki-laki
					Kepala Dinas	1. Belum memahami mengenai kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia pernikahan dan kelahiran	Internal	C	1. Meningkatkan kematian ibu dan bayi	1. Masyarakat 2. Anak 3. Remaja perempuan



**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD**

Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Penilaian : 2021 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021 -2026 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah				
Sumber Data	Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026			
Tujuan Strategis	<b>Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b> Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah			
Sasaran Strategis (tebalkan yang dipilih)	<b>1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan</b> 2. Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif 3. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak 4. Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 5. Meningkatkan kualitas keluarga 6. Meningkatnya akseptor KB 7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan			
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)		<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target tahun V</b>
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen ARG SKPD	35
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Monev PUG di Kab/ Kota	11
	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dokumen Hasil Rakor	1
	4	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	5
	5	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Promosi	3
	6	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan UMKM Menengah yang dilatih	40
Informasi Lain	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			

	<p>Indikator :</p> <p>Jumlah Dokumen ARG SKPD</p> <p>Jumlah Monev PUG di Kab/ Kota</p> <p>Dokumen Hasil Rakor</p> <p>Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</p> <p>Kewenangan Provinsi</p> <p>Dokumen Hasil Promosi</p> <p>Jumlah Perempuan UMKM Menengah yang dilatih</p>
	<p>Palangka Raya, 06 Desember 2021</p> <p>Pit. Kepala Dinas P3A/PPKB Provinsi Kalimantan Tengah</p>  <p><b>Dr. LINA VICTORIA ADEN, M.M.</b> Kes  Pembina Tingkat I  NIP. 19680717 199903 2 006</p>



Formulir Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Operasional OPD



Nama OPD : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah  
 Nama OPD : Pembudayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Tahun Perencanaan : 2021  
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021 -2026  
 Tujuan Strategis OPD : Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan  
 Sasaran Strategis OPD : Meningkatkan Pembudayaan Perempuan dalam pembangunan  
 Urutan Pemerintahan : Pembudayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	Subkegiatan	Indikator Keluaran	Risiko		Sabab <sup>*)</sup>		Dampak <sup>**)</sup>			
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kementerian Provinsi	Jumlah Dokumen ARG S-CPD	Minimnya Perencanaan dan Perencanaan Responsif Gender		Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Minimnya Kapasitas SDM di masing-masing Perangkat Daerah	Eksternal	C	Rendahnya nilai ARG di Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas P3APPKB, Perempuan sebagai Objek Pemantauan
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kementerian Provinsi	Jumlah Monev PUG di Kab/ Kota	Rendahnya pelaksanaan PUG di masyarakat		Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Kurangnya pemahaman tentang konsep PUG	Eksternal	C	Minimnya peran perempuan dalam perekonomian pembangunan	Dinas P3APPKB, Perempuan sebagai Objek
3	Advokasi Kebijakan dan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dokumen Hasil Rakor	Ketersediaan pelaksanaan PUG termasuk PPRG di tingkat Kab/Kota		Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Kelelahan advokasi ke tingkat daerah kabupaten/kota	Internal	C	belum meratanya kesepahaman bersama tentang pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dinas P3APPKB, Perempuan sebagai Objek Pemantauan
4	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kementerian	Dokumen hasil kegiatan Peningkatan	Pelaksanaan sosialisasi partisipasi perempuan belum optimal		Bidang Kualitas Hidup Perempuan	ketersediaan anggaran dan belum menjadi prioritas	Internal	C	Lemahnya kapasitas perempuan dalam mendukung pembangunan	Dinas P3APPKB, Perempuan sebagai Objek Pemantauan
5	Advokasi Kebijakan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kementerian	Dokumen Hasil Promosi	Lemahnya kegiatan dalam mendukung partisipasi perempuan di ekonomi		Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Pelaksanaan advokasi belum tepat sasaran dan belum terfokus pada hal yang berkaitan pada partisipasi perempuan	Internal	C	Rendahnya ekonomi perempuan dalam rumah tangga	Dinas P3APPKB, Perempuan sebagai Objek Pemantauan
6	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemertayaan Perempuan Kementerian Provinsi	Jumlah Perempuan UMKUM Meringan yang dilatih	Minimnya kerjasama antar lembaga penyedia layanan Pemertayaan Perempuan		Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Belum terfasilitasinya atau terlaksananya forum diskusi antar lembaga	Eksternal	C	masih belum tersentralisasi tujuan dan fokus peran lembaga pemertayaan erempuan	Dinas P3APPKB, Perempuan sebagai Objek Pemertayaan Pembangunan

Pelangka Ray, 06 Desember 2021  
 P. Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah



PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Provinsi Kalimantan Tengah			
Tahun Penilaian	: 2021			
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021 -2026			
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah			
Sumber Data	Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi			
Tujuan Strategis	<p>Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</p> <p>Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan</p> <p>Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak</p> <p>Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB</p> <p>Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera</p> <p>Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah</p>			
Sasaran Strategis (tebalkan yang dipilih)	<p>1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan</p> <p>2. Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif</p> <p>3. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak</p> <p>4. Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>5. Meningkatkan kualitas keluarga</p> <p>6. Meningkatnya akseptor KB</p> <p>7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</p>			
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)		Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun V
	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	1
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	1
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil Rakornas FAN	1
	4	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi (Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi)	1
Informasi Lain				
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</p> <p>Kegiatan :</p> <p>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</p> <p>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</p> <p>Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator :</p> <p>Dokumen hasil pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak</p> <p>Dokumen hasil Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA</p> <p>Dokumen hasil Rakornas FAN</p> <p>Dokumen hasil Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi (Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi)</p>			
		<p>Palangka Raya, 06 Desember 2021</p> <p>Plt. Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p></p> <p>dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19980717 199903 2 006</p> <p></p>		



**Formulir Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Operasional OPD**


Nama OPD : Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah  
 Tahun Perencanaan : Perencanaan Perempunan, Perindugan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 : 2021  
 : Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perindugan Khusus terhadap Anak  
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan pemenuhan hak dan perindugan terhadap anak  
 : Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perindugan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 OPD yang Dirinci : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindugan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	Subkegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sabab <sup>(*)</sup>			Dampak <sup>(**)</sup>	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil pelaksanaan pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	Minimnya pencapaian kabupaten/kota yang KLA		Bidang Perindugan dan pemenuhan Hak Anak	Minimnya Kapasitas SDM di masing-masing Perangkat Daerah	Eksternal	C	Rendahnya pencapaian Kabupaten/kota yang KLA minimal Tingkat Pratama	Dinas P3APPKB, Masyarakat, Anak sebagai Objek pelaksanaan KLA
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	belum optimalnya pelaksanaan Monev KLA		Bidang Perindugan dan pemenuhan Hak Anak	Minimnya Kapasitas SDM	Internal	C	Rendahnya pencapaian Kabupaten/kota yang KLA minimal Tingkat Pratama	Dinas P3APPKB, Masyarakat, Anak sebagai Objek pelaksanaan KLA
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peringkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen hasil Rakomas FAN	Minimnya peran anak dan suara anak dalam peningkatan pembangunan		Bidang Perindugan dan pemenuhan Hak Anak	Belum optimalnya peran FAD di tingkat daerah dan dalam kegiatan FGD perencanaan pembangunan daerah	Eksternal	C	Minimnya perhatian terhadap Hak-hak anak	Dinas P3APPKB, Masyarakat, Anak
4	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peringkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi (Harl Anak Nasional Tingkat Provinsi)	Minimnya kerjasama antar lembaga Penyedia Peringkatan Kualitas Hidup Anak		Bidang Perindugan dan pemenuhan Hak Anak	Belum terfasilitasinya atau terlaksananya forum diskusi antar lembaga	Eksternal	C	masih belum tersentralisasi tujuan dan fokus peran lembaga Penyedia Peringkatan Kualitas Hidup Anak	Dinas P3APPKB, Masyarakat, Anak

Kalimantan Tengah, 06 Desember 2021  
 Ptl. Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah  
 dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M Kes  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19600717199003 2 006



## PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Provinsi Kalimantan Tengah			
Tahun Penilaian	2021			
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2021 -2026			
Urusan Pemerintahan	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
OPD yang Dinilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah			
Sumber Data	Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026			
Tujuan Strategis	Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB <b>Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera</b> Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah			
Sasaran Strategis (tebalkan yang dipilih)	1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan 2. Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif 3. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak 4. Mengoptimalkan kualitas data pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah <b>5. Meningkatkan kualitas keluarga</b> <b>6. Meningkatnya akseptor KB</b> 7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			
Program/ Kegiatan Unit Kerja	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Pengendalian Penduduk (PP) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)		Sub Kegiatan	Indikator	Target tahun V
	1	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyediaan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK	2
	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen hasil Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1
	3	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Dokumen hasil Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1
	4	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kegiatan KIE PP,KB dan Pembangunan Keluarga	2
5	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Dokumen hasil Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	1	
Informasi Lain				
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Pengendalian Penduduk (PP) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan : Pengelolaan Pelaksanaan Design Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyediaan Pengasuhan 1000 HPK Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi Advokasi dan Sosialisasi GDPK Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK Indikator : Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK Dokumen hasil Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi Dokumen hasil Advokasi dan Sosialisasi GDPK Jumlah kegiatan KIE PP,KB dan Pembangunan Keluarga Dokumen hasil Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK			
			Palangka Raya, 05 Desember 2021 Pl. Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah  dr. LINA VICTORIA ADEN, M.M.Kes Pembina Tingkat I NIP.19680117 199903 2 006	

**Formulir Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah  
 Nama OPD : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Tahun Penilaian : 2021  
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021 -2026  
 Tujuan Strategis : 1. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan 2. Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak  
 Sasaran strategis OPD : 1. Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif 2. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak  
 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 OPD yang Dinilai : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

No	SubKegiatan	Indikator Keluaran	Risiko		Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	
1	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK	Minimnya pemahaman tentang 1000HPK		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rendahnya tingkat ekonomi keluarga	Eksternal	C	1. Minimnya tingkat kecerdasan anak 2. Rendahnya sistem imun anak kini dan dikemudian hari rentan terhadap penyakit	1. Masyarakat 2. Anak
2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen hasil Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Belum optimalnya penyusunan Dokumen GDPK sesuai standar panduan dokumen		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemahaman yang belum maksimal mengenai pokok-pokok pembangunan kependudukan	Internal dan eksternal	C	Penyempurnaan dan pembaharuan dokumen GDPK secara berkala	1. Masyarakat 2. Dinas P3A
3	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Dokumen hasil Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Minimnya pemahaman pokok-pokok dalam dokumen GDPK		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Proses advokasi dan sosialisasi secara bertahap dan tidak dapat sekaligus	Eksternal	C	Belum selarasnya pelaksanaan GDPK	1. Masyarakat 2. Dinas P3A
4	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kegiatan KIE PP,KB dan Pembangunan Keluarga	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kearifan budaya lokal		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Keterbatasan anggaran dan SDM	Internal	C	belum seluruhnya masyarakat memahami konsep pembangunan keluarga sesuai kearifan lokal	1. Masyarakat 2. Dinas P3A
5	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Dokumen hasil Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Belum terlaksananya kemitraan dengan lembaga terkait KKBPK		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Minimnya pemahaman keluarga tentang program KKBPK		C	Belum terfasilitasinya mitra kerja dalam program KKBPK	1. Masyarakat 2. Dinas P3A

Ralangka/Raya, 06 Desember 2021  
 Plt. Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah



dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M Kes  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680717 199903 2 006



Formulir Kertas Kerja  
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Penilaian	: 2021
Tujuan Strategis Pemda	: Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)
Tujuan Strategis OPD	: Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah
Tujuan Operasional OPD	:
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>I Risiko Strategis OPD 1:</b>					
	Rendahnya Peran Perempuan di Perekonomian daerah		3	4	12
	Minimnya Penggunaan Anggaran yang Responsif Gender		3	3	9
	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan		4	4	16
	Belum optimalnya pencapaian Bobot 5 klaster pemenuhan Indikator IPA		4	4	16
	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap anak		3	4	12
	Ketidakefektifan dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga		3	3	9
	Peningkatan Jumlah Anak		3	3	9
	Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah		3	3	9
	Trauma Penggunaan Alat KB		3	3	9
	Kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), perdarahan persalinan		3	3	9
<b>II Risiko Operasional OPD 1 (bidang I):</b>					
	Minimnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender		3	3	9
	Rendahnya pelaksanaan PUG di masyarakat		3	3	9
	Ketidaksiapan pelaksanaan PUG termasuk PPRG di tingkat Kab/kota		3	3	9
	Pelaksanaan sosialisasi partisipasi perempuan belum optimal		3	3	9
	Lemahnya kebijakan dalam mendukung partisipasi perempuan di ekonomi		4	4	16
	Minimnya kerjasama antar lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		3	3	9
<b>III Risiko Operasional OPD 2 (bidang III):</b>					
	Minimnya pencapaian kabupaten/kota yang KLA		4	4	16
	belum optimalnya pelaksanaan Movev KLA		3	3	9
	Minimnya peran anak dan suara anak dalam peningkatan pembangunan		3	3	9
	Minimnya kerjasama antar lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak		3	3	9
<b>IV Risiko Operasional OPD 3 (bidang V):</b>					
	Minimnya pemahaman tentang 1000HPK		4	3	12
	Belum optimalnya penyusunan Dokumen GDPK sesuai standar panduan dokumen		3	3	9
	Minimnya pemahaman pokok-pokok dalam dokumen GDPK		3	3	9
	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan KJE sesuai dengan kearifan budaya lokal		3	3	9
	Belum terlaksananya kemitraan dengan lembaga terkait KKBPK		3	3	9

Palangka Raya, 06 Desember 2021  
Pit. Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah



Dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes  
Pembina Tingkat I  
NIP.196807411999032006

MATRIKS ANALISIS RISIKO

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi				Sangat signifikan
			Tidak signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	
			1	2	3	4	
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	5					
	Kemungkinan besar	4					
	Kemungkinan kecil	3					
	Sangat jarang	2					
	Sangat jarang	1					
		<b>Keterangan :</b>	<b>Rendah</b>	Risiko dapat diterima			
			<b>Sedang dan Tinggi</b>	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya			
			<b>Sangat Tinggi</b>	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Prioritas			



Formulir Kertas Kerja  
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah  
 Tahun Penilaian : 2021  
 Tujuan Strategis : Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan  
 Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan  
 Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak  
 Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB  
 Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera  
 Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah  
 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis OPD 1			Kepala Dinas		
	Rendahnya Peran Perempuan di Perekonomian daerah		12		Minimnya Kapasitas Perempuan dalam dunia usaha	1. Menurunnya Indeks Pemberdayaan Gender
	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan		16		1. Ketidapahaman atas jenis-jenis tindak kekerasan terhadap perempuan 2. Budaya masyarakat yang masih malu melaporkan masalah di keluarga	1. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terdeteksi 2. Layanan tidak terfasilitasi secara optimal
	Belum optimalnya pencapaian Bobot 5 klaster pemenuhan Indikator IPA		16		1. Perlindungan anak khususnya pada bidang kesehatan dan kesejahteraan dasar, perlindungan khusus, pendidikan masih membutuhkan perhatian yang ekstra	1. Rendahnya Pemenuhan Hak Anak, Minimnya Perlindungan Anak, serta Rendahnya Tingkat Intelegensi Anak 2. Minimnya kesiapan generasi usia anak menghadapi Bonus Demografi
	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap anak		12		1. Ketidapahaman atas jenis-jenis tindak kekerasan terhadap anak 2. Budaya masyarakat yang masih malu melaporkan masalah di keluarga	1. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terdeteksi 2. Layanan tidak terfasilitasi secara optimal
II	Risiko Operasional OPD 1 (bidang h- Lemahnya kebijakan dalam mendukung partisipasi perempuan di ekonomi		16	Dinas P3APPKB	Pelaksanaan advokasi belum tepat sasaran dan belum terfokus pada hal yang berkaitan pada partisipasi perempuan	Rendahnya ekonomi perempuan dalam rumah tangga
III	Risiko Operasional OPD 2 (bidang iii- Minimnya pencapaian kabupaten/kota yang KLA		16	Dinas P3APPKB	Minimnya Kapasitas SDM di masing-masing Perangkat Daerah	Rendahnya pencapaian Kabupaten/kota yang KLA minimal Tingkat Pratama
IV	Risiko Operasional OPD 3 (bidang vi- Minimnya pemahaman tentang 1000HPK		12	Dinas P3APPKB	Rendahnya tingkat ekonomi keluarga	1. Minimnya tingkat kecerdasan anak 2. Rendahnya sistem imun anak kini dan dikemudian hari rentan terhadap penyakit

Palangka Raya, 06 Desember 2021

Pit. Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

dr. LINA VICTORIA ADEN, M.M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP.19680711999032006

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah  
 Tahun Penilaian : 2021  
 Tujuan Strategis : Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan  
 Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan  
 Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak  
 Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB  
 Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera  
 Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uralan Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I Risiko Strategis OPD 1</b>							
1	Rendahnya Peran Perempuan di Perekonomian daerah		1. Sosialisasi Peningkatan Ekonomi keluarga	Tidak Ada	1. Merencanakan kegiatan yang terfokus pada peningkatan ekonomi perempuan 2. Mendorong perempuan untuk berwirausaha dengan pelaksanaan pelatihan berwirausaha	Kepala Dinas	12 bulan
2	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan		1. Sosialisasi Layanan Pengaduan UPT PPA 2. Penguatan Jejaring lembaga perlindungan perempuan	Tidak Ada	1. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait tindak kekerasan terhadap perempuan 2. Siaga terhadap aduan dari masyarakat melalui Hotline 24jam UPT PPA		12 bulan
3	Belum optimalnya pencapaian Bobot 5 klaster pemenuhan Indikator IPA		1. Koordinasi KLA ke tingkat kabupaten/kota	Tidak Ada	Mendorong dan memberikan pembinaan kabupaten/kota menuju KLA minimal tingkat Pratama		12 bulan
4	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap anak		1. Sosialisasi Layanan Pengaduan UPT PPA 2. Penguatan Jejaring lembaga perlindungan perempuan	Tidak Ada	1. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait tindak kekerasan terhadap anak 2. Siaga terhadap aduan dari masyarakat melalui Hotline 24jam UPT PPA		12 bulan
<b>II Risiko Operasional OPD 1 (bidang I):</b>							
1	Lemahnya kebijakan dalam mendukung partisipasi perempuan di ekonomi		Monitoring pelaksanaan partisipasi perempuan di bidang ekonomi	Tidak Ada	Pendataan dan pembinaan partisipasi perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga di bidang usaha	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	12 bulan
<b>III Risiko Operasional OPD 2 (bidang III) :</b>							
1	Minimnya pencapaian kabupaten/kota yang KLA		Monitoring dan Evaluasi pencapaian KLA di tingkat kabupaten/kota	Tidak Ada	Pendataan dan Pembinaan Penyusunan dokumen-dokumen pendukung KLA	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	12 bulan
<b>IV Risiko Operasional OPD 3 (bidang V):</b>							
1	Minimnya pemahaman tentang 1000HPK		Sosialisasi tentang 1000HPK	Tidak Ada	Koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya yang terkait pencegahan stunting pada anak	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12 bulan

Palangka Raya, 08 Desember 2021  
 P.T. Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah



dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M.Kes  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.196807171990032006



RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Provinsi Kalimantan Tengah  
 Tahun Penilaian : 2021  
 Tujuan Strategis : Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan  
 Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan  
 Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap Anak  
 Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB  
 Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera  
 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi peningkatan ekonomi perempuan dalam berwirausaha	Rapat, Monitoring Langsung, reviu Rencana, Evaluasi	Dinas P3APPKB	2 kali		
2	Monitoring dan evaluasi pelayanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Rapat, Monitoring Langsung, reviu Rencana, Evaluasi	Dinas P3APPKB	4 kali		
3	Pembinaan dalam pemenuhan hak anak sesuai yang tertuang pada 5 kluster dalam indikator IPA	Rapat, Monitoring Langsung, reviu Rencana, Evaluasi	Dinas P3APPKB	4 kali		
4	Monitoring dan evaluasi pelayanan pengaduan tindak kekerasan terhadap anak	Rapat, Monitoring Langsung, reviu Rencana, Evaluasi	Dinas P3APPKB	4 kali		
5	Koordinasi dan advokai terkait kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan	Rapat, Monitoring Langsung, reviu Rencana, Evaluasi	Dinas P3APPKB	2 kali		
6	Monitoring dan Evaluasi ke kabupaten/kota yang belum KLA	Rapat, Monitoring Langsung, reviu Rencana, Evaluasi	Dinas P3APPKB	4 kali		
7	Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi terkait pencegahan dan penurunan angka stunting di daerah	Rapat, Monitoring Langsung, reviu Rencana, Evaluasi	Dinas P3APPKB	2 kali		

Palangka Raya, 03 Desember 2021  
 Ptt, Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah



dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.1968071/199903 2 006